



ANALISIS PERBANDINGAN EKONOMI INDONESIA DAN FILIPINA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI

¹Ahmad Nasrullah & ²Erina Dwi Octavia

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Wiraraja, Sumenep

ahmadnasrullah@gmail.com

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Wiraraja, Sumenep

erinadwioktavianiani03@gmail.com

*Received 1 January 2026; Revised: 3 January 2026; Accepted: 15 January 2026; Published: 20 January 2026; Available online:
January 2026*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transisi ekonomi Indonesia dan Filipina dalam perspektif pembangunan ekonomi dengan menelusuri perubahan struktur ekonomi sejak 1960 hingga era reformasi. Kajian dilakukan dengan menganalisis kondisi ekonomi secara umum, sektor ekonomi khusus yang menjadi penopang utama pemulihan, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa transisi setelah kejatuhan rezim pemerintahan. Filipina mengawali masa transisinya setelah kejatuhan Ferdinand Marcos pada tahun 1986, yang dipicu oleh krisis ekonomi yang berlangsung panjang dan mencapai puncaknya pada kontraksi tajam tahun 1984-1985. Sementara Indonesia mengalami transisi ketika krisis moneter Asia pada 1997-1998 menyebabkan keruntuhan ekonomi dan memicu perubahan politik menuju era Reformasi. Hasil menunjukkan bahwa kedua negara mengimplementasikan pendekatan yang berbeda: Filipina mengadopsi liberalisasi ekonomi dan remitansi tenaga kerja sebagai strategi utama, sedangkan Indonesia menekankan reformasi struktural, stabilisasi fiskal, dan penguatan sektor industri dan UMKM. Penelitian ini menegaskan perbedaan strategi pembangunan nasional yang dipilih kedua negara dan memberikan pemahaman mengenai pengaruh konteks politik terhadap efektivitas kebijakan ekonomi

Kata Kunci: *Transisi Ekonomi, Indonesia, Filipina, Kebijakan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi*

ABSTRACT

This study aims to examine the economic transitions of Indonesia and the Philippines from an economic development perspective by tracing changes in economic structure from 1960 to the Reformasi era. The study analyzes general economic conditions, specific economic sectors that were the mainstays of recovery, and the economic policies implemented during the transition period following the fall of the regime. The Philippines began its transition period

after the fall of Ferdinand Marcos in 1986, triggered by a prolonged economic crisis that culminated in a sharp contraction in 1984-1985. Meanwhile, Indonesia experienced a transition when the Asian monetary crisis of 1997-1998 caused economic collapse and triggered political changes leading to the Reformasi era. The results show that the two countries adopted different approaches: the Philippines adopted economic liberalization and labor remittances as their primary strategies, while Indonesia emphasized structural reform, fiscal stabilization, and strengthening the industrial and MSME sectors. This study highlights the differences in national development strategies chosen by the two countries and provides insight into the influence of the political context on the effectiveness of economic policies

Keywords: *Economic Transition, Indonesia, Philippines, Economic Policy, Economic Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan transformasi struktural yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai lebih tinggi seiring waktu. Proses ini secara historis melibatkan transformasi dari ekonomi berbasis subsisten, seperti masa beternak dan bertani, menuju kegiatan ekonomi yang lebih kompleks seperti industrialisasi dan teknologi tinggi. Transformasi struktural ini penting karena tidak hanya meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan

mendorong kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sangat penting sebagai indikator kemajuan sosial dan ekonomi, karena menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas jangka panjang. Transisi ekonomi menjadi bagian penting dalam proses tersebut, terutama di negara berkembang yang mengalami tekanan politik, krisis finansial, dan perubahan sistem pemerintah (Aprillia et al., 2024). Indonesia, sebagai negara kepulauan yang besar, memiliki sejarah pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh periode pasang surut. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa hiperinflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Namun, melalui reformasi ekonomi di masa Orde Baru, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, didorong oleh kebijakan industrialisasi dan ekspor minyak sebagai sumber devisa utama, serta stabilisasi moneter yang

berhasil mengatasi hiperinflasi parah pada awal 1960-an. Pertumbuhan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berkinerja progresif sebelum krisis moneter Asia 1997-1998 (Chalandra et al., 2025)

Dampak pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia sangat besar bagi masyarakat. Peningkatan aktivitas industri dan ekspor membuka lebih banyak lapangan kerja, yang secara bertahap mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan standar hidup. Kestabilan ekonomi yang tercipta juga memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya guna pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Secara umum, pertumbuhan ini menciptakan kelas menengah yang lebih besar dan memperkuat konsumsi domestik. Meskipun demikian, pertumbuhan yang cepat ini juga menimbulkan tantangan terkait pemerataan, yang kemudian menjadi fokus utama reformasi pasca-krisis 1998 (Hartati, 2021).

Filipina memiliki sejarah pertumbuhan ekonomi yang penuh gejolak. Setelah pengumuman darurat militer pada awal 1970-an, ekonomi Filipina sempat mengalami pertumbuhan yang tinggi, mencapai 8,9% pada 1973 dan 8,8% pada 1976. Namun, kemajuan ini ternyata tidak berkelanjutan karena didorong

oleh kebijakan pembangunan berbasis pinjaman yang tidak efisien dan menyebabkan peningkatan drastis utang luar negeri. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1960-an mencapai puncaknya pada kontraksi tajam -7% pada 1984-1985, yang kemudian memicu transisi politik setelah kejatuhan Ferdinand Marcos pada tahun 1986.

Di negara Indonesia, kebijakan tentang pertumbuhan ekonomi ini sangat pesat terutama dalam hal Reformasi Struktural dan Stabilisasi Fiskal. Pasca-krisis moneter 1997-1998, Indonesia berfokus pada perbaikan fondasi ekonomi yang rentan. Kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi sistem perbankan untuk mengatasi kegagalan sistemik, desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah dan pemerataan pembangunan, serta penguatan sektor industri dan UMKM. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap modal global dan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis domestik, sehingga menghasilkan stabilitas jangka panjang yang lebih kokoh dibandingkan dengan pemulihan yang cepat tetapi rapuh

Di negara Filipina, kebijakan tentang pertumbuhan ekonomi ini sangat pesat terutama dalam hal Liberalisasi Ekonomi dan Remitansi Tenaga Kerja. Setelah transisi pada tahun 1986, Filipina

memilih pendekatan yang mengandalkan keterbukaan pasar dan dukungan eksternal. Kebijakan utama yang diterapkan meliputi privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), liberalisasi perdagangan, dan penerapan Program Structural Adjustment (SAP) dari IMF dan World Bank. Selain itu, pemerintah secara strategis mendorong dan mengandalkan remitansi dari pekerja migran (Tenaga Kerja Luar Negeri/TKLN) yang menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi dan menyumbang sekitar 11% PDB. Strategi ini menghasilkan pemulihan yang lebih cepat, namun membuat ekonomi Filipina rentan terhadap fluktuasi kondisi global (Indonesia & Darmastuti, 2021).

Filipina dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki pengalaman transisi ekonomi signifikan yang dipicu oleh krisis makro ekonomi yang menghancurkan stabilitas nasional. Filipina memasuki masa transisi pada tahun 1986 setelah kejatuhan rezim Ferdinand Marcos melalui gerakan People Power Revolution. Krisis ekonomi telah berlangsung sejak 1960-an dan diperdalam oleh kebijakan pembangunan berbasis pinjaman yang tidak berkelanjutan. Pertumbuhan yang semula tinggi setelah pengumuman darurat militer pada awal 1970-an, yaitu 8,9% pada 1973 dan 8,8% pada 1976, berubah drastis menjadi kontraksi -7% pada 1984-1985 sebagai akibat kegagalan struktur fiskal dan meningkatnya utang

luar negeri (Political Economy of Philippine Economic Reforms) (Sicat, 2002). Utang luar negeri meningkat dari 13 miliar USD (1979) menjadi 29 miliar USD (1989), menunjukkan ketidakmampuan pemerintah membayar beban ekonomi (The Philippines in the 1980s) (Solon & Floro, 1993). Hal ini sangat berdampak kepada masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, di mana utang luar negeri yang masif dan kegagalan struktur fiskal rezim Marcos menyebabkan kontraksi ekonomi yang tajam, hilangnya lapangan kerja, dan peningkatan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Akibatnya, terjadi peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang memicu kerusuhan dan ketidakstabilan politik, yang mencapai puncaknya pada People Power Revolution (rachmat hidayatullah, 2022).

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komparatif terkait strategi transisi ekonomi kedua negara dan bagaimana perbedaan pendekatan kebijakan memengaruhi perkembangan ekonomi jangka panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses transisi ekonomi, perubahan struktur ekonomi, serta kebijakan pembangunan

yang diterapkan di Indonesia dan Filipina dalam konteks historis dan politik yang berbeda. Metode deskriptif-komparatif digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan karakteristik, strategi, serta hasil kebijakan ekonomi kedua negara tanpa melakukan pengujian statistik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengandalkan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah dan dokumen resmi. Data dikumpulkan melalui penelaahan buku ekonomi pembangunan, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional (seperti IMF dan World Bank), publikasi statistik, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan topik transisi ekonomi Indonesia dan Filipina sejak dekade 1960-an hingga era pasca-reformasi dan pasca-transisi politik

periode waktu dan konteks negara. Kedua, analisis historis dan kebijakan, yaitu menelusuri keterkaitan antara krisis ekonomi, perubahan politik, dan arah kebijakan pembangunan ekonomi. Ketiga, analisis perbandingan, dengan membandingkan strategi pemulihan ekonomi Indonesia dan Filipina untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan, tingkat ketergantungan terhadap faktor eksternal, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana perbedaan konteks politik dan struktur ekonomi memengaruhi pilihan kebijakan pembangunan di kedua negara, serta menjelaskan mengapa Indonesia dan Filipina menunjukkan pola pemulihan dan ketahanan ekonomi yang berbeda meskipun sama-sama mengalami krisis besar sebagai titik awal transisi ekonomi.

PEMBAHASAN

1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia

Sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di era Orde Baru, ditandai oleh transformasi dari ekonomi berbasis pertanian dan komoditas mentah menuju industrialisasi yang didorong oleh kebijakan stabilisasi. Indonesia memanfaatkan pendapatan dari ekspor minyak sebagai devisa utama untuk membiayai pembangunan dan impor barang modal. Meskipun demikian, sektor-sektor tradisional seperti peternakan dan pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja yang besar. Pertumbuhan tinggi ini membuat Indonesia diakui sebagai salah satu "Macan Asia", didorong oleh ekspor non-migas dan masuknya investasi asing. Namun, fokus pada pertumbuhan berbasis utang dan modal asing membuat fondasi ekonomi rentan terhadap

guncangan eksternal (Kusumawati et al., 2024).

Hal diatas sangat penting bagi kita di negara Indonesia untuk memiliki sistem perekonomian yang stabil di jangka panjang. Jangka panjang bagi Indonesia adalah mencapai status negara maju dengan ketahanan ekonomi domestik yang kuat dan tidak rentan terhadap krisis global. Solusinya adalah terus melanjutkan reformasi struktural, memperkuat sektor riil domestik seperti UMKM dan industri manufaktur, serta memastikan tata kelola ekonomi yang transparan. Manfaat bagi rakyat Indonesia adalah terciptanya lapangan kerja yang stabil, peningkatan kualitas hidup, serta kestabilan harga yang tidak mudah terpengaruh oleh gejolak mata uang asing, yang pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara berkelanjutan. Di tahun 1998 Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan dikenal sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki kinerja ekonomi progresif, seperti:

1. Industrialisasi Cepat: Indonesia berhasil menggeser struktur ekonominya dari berbasis pertanian ke manufaktur dan industri.
2. Ekspor Non-Migas: Peningkatan pesat pada perdagangan dan ekspor produk non-migas, seperti tekstil dan elektronik, menunjukkan daya saing global.
3. Investasi Asing: Masuknya investasi asing langsung yang besar untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur.
4. Stabilisasi Moneter: Keberhasilan mengatasi hiperinflasi parah di awal 1960-an dan pemulihan kepercayaan internasional terhadap sistem ekonomi.
5. Pembangunan Berbasis Utang: Pertumbuhan tersebut juga didorong oleh Pembangunan berbasis pinjaman luar negeri yang cepat, meskipun hal ini menjadi kelemahan mendasar (Saputro, 2025).

Indonesia disebut salah satu negara berkembang berkinerja progresif sebelum krisis 1997-1998 karena keberhasilan Industrialisasi Cepat yang menggeser struktur ekonomi dari pertanian ke manufaktur. Adanya peningkatan pesat pada Ekspor Non-Migas, seperti tekstil dan elektronik, menunjukkan daya saing global. Selain itu, masuknya Investasi Asing langsung dalam jumlah besar membiayai proyek pembangunan dan infrastruktur. Keberhasilan dalam Stabilisasi Moneter juga berperan penting, termasuk upaya mengatasi hiperinflasi parah pada awal 1960-an. Namun, fokus pada pembangunan berbasis utang luar negeri yang cepat menjadi kelemahan mendasar yang menyebabkan fondasi ekonomi tidak sepenuhnya kokoh saat diterpa krisis moneter Asia (Ahmed & Ahsan, 2024). krisis moneter menunjukkan bahwa

kekuatan ekonomi sebelumnya belum sepenuhnya kokoh. Setelah masa transisi, strategi pemulihan ekonomi berfokus pada memperkuat struktur ekonomi domestik dan membangun ketahanan ekonomi nasional (Ariffianti & Maryam, 2025)

Transisi Ekonomi di Indonesia

Transisi ekonomi Indonesia dimulai pada tahun 1998, ditandai dengan berakhirnya rezim Orde Baru setelah krisis moneter Asia 1997-1998 yang menghancurkan perekonomian

nasional. Pada periode sebelumnya, khususnya sejak 1966, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kebijakan stabilisasi dan modernisasi ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan ekspor minyak sebagai sumber devisa utama negara. Masa tersebut dianggap sebagai awal perubahan struktural ekonomi karena berhasil mengatasi hiperinflasi yang mencapai 600% pada awal 1960-an dan memulihkan kepercayaan internasional terhadap sistem ekonomi Indonesia (Chalandra et al., 2025)

Namun, fondasi ekonomi yang bergantung pada modal internasional serta lemahnya sistem perbankan membuat Indonesia rentan menghadapi krisis eksternal. Ketika krisis moneter Asia terjadi, nilai rupiah terdepresiasi drastis dan sistem keuangan mengalami kegagalan sistemik, menyebabkan

pertumbuhan ekonomi turun tajam hingga -13% pada tahun 1998, memicu ketidakstabilan sosial dan politik yang berujung pada transisi ekonomi dan pemerintahan. Transisi ini membuka babak baru menuju era Reformasi dengan fokus pada transparansi kebijakan dan kestabilan jangka panjang. Reformasi kebijakan ini yaitu berupa krisis moneter, fokus reformasi kebijakan di Indonesia diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik dan membangun ketahanan nasional demi mencapai kestabilan jangka panjang. Rencana strategis ini berupaya mengurangi ketergantungan pada modal global dan memperkuat ekonomi berbasis domestik. Dampaknya adalah pemulihan yang bertahap namun menghasilkan stabilitas yang lebih kokoh, menjadikannya lebih tahan terhadap krisis global di masa depan. Yang dimana kebijakan tersebut memiliki dampak dan pengaruh besar bagi negara Indonesia untuk kedepannya (Susanto, 2025).

Kebijakan Ekonomi di Negara Indonesia

Dalam hal ini tentu dibutuhkan sebuah kebijakan, yang dimana kebijakan ini dapat memberikan solusi serta manfaat kepada masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pasca transisi, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang menekankan reformasi struktural,

stabilisasi fiskal, dan penguatan sektor domestik. Tujuannya adalah membangun fondasi ekonomi yang tidak rentan terhadap guncangan eksternal dan mampu mencapai status negara maju dengan ketahanan ekonomi domestik yang kuat. Kebijakan ini berupaya menciptakan lapangan kerja stabil, meningkatkan kualitas hidup, dan menekan ketimpangan serta kemiskinan secara berkelanjutan (Santoso & Samputra, 2024)

Untuk memberikan Kontribusi nyata kepada masyarakat, Negara Indonesia membutuhkan kebijakan mengenai pertumbuhan ekonomi dimasa jangka panjang. Berikut ini ada beberapa Kebijakan Ekonomi Pasca Transisi di Indonesia yang terdiri dari:

1. Restrukturisasi sistem perbankan dan penutupan bank bermasalah Kebijakan ini penting untuk mengatasi kegagalan sistemik dan memulihkan kepercayaan terhadap sistem keuangan pasca krisis, yang merupakan kelemahan mendasar sebelum tahun 1998 (Siswanto, 2024).

2. Penghapusan monopoli ekonomi dan pembukaan ruang kompetisi terbuka Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola ekonomi yang transparan dan mendorong investasi swasta serta efisiensi di pasar domestik (Aditya et al., 2023).

3. Desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah Desentralisasi bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian

fiskal di daerah, mengurangi beban ketergantungan pada kebijakan pusat, dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata (Khoirul Fahmi Rizqi, Saiful Anwar Nuris, 2024).

4. Dorongan terhadap investasi swasta dan UMKM sebagai basis ekonomi nasional Penguatan sektor riil domestik seperti UMKM dan industri manufaktur menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap modal global dan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis dalam negeri (Caesar et al., 2025).

Dari beberapa Kebijakan yang telah disebutkan diatas, Hal tersebut dapat berpengaruh besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia, supaya perekonomian di Negara Indonesia menjadi terarah dan jelas untuk mencapai suatu tujuan agar berjalan sesuai rencana dengan efisien dan efektif sesuai rencana. Kebijakan tersebut menjadikan arah pemulihan ekonomi berjalan bertahap namun menghasilkan stabilitas yang lebih kuat dibanding sebelum krisis (Ginting et al., 2021).

2.1 Pertumbuhan Ekonomi di Negara Filipina

Filipina memiliki sejarah pertumbuhan ekonomi yang penuh gejolak. Setelah pengumuman darurat militer pada awal 1970-an, ekonomi sempat mengalami pertumbuhan yang tinggi, mencapai 8,9% pada 1973 dan 8,8% pada 1976. Namun, kemajuan ini ternyata tidak berkelanjutan karena didorong

oleh kebijakan pembangunan berbasis pinjaman luar negeri yang tidak efisien, menyebabkan peningkatan drastis utang luar negeri dan kegagalan struktur fiskal. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak 1960-an mencapai puncaknya pada kontraksi tajam - 7% pada 1984-1985. Pasca transisi, pemulihan ekonomi Filipina bertumpu pada ekspor barang non-migas seperti elektronik dan tekstil, serta remitansi tenaga kerja migran yang menyumbang sekitar 11% PDB, menunjukkan ketergantungan kuat pada pasar global (Anggraini, 2024).

Hal diatas sangat penting bagi kita di negara Filipina untuk memiliki sistem perekonomian yang stabil di jangka panjang Keterpurukan ekonomi jangka panjang dipicu oleh ketergantungan pada modal asing disebabkan oleh Strategi pembangunan yang didominasi oleh kebijakan berbasis pinjaman luar negeri yang tidak efisien. Hal ini menyebabkan peningkatan utang luar negeri secara drastis dari 13 miliar USD (1979) menjadi 29 miliar USD (1989). lemahnya sektor industri dipengaruhi oleh faktor Kegagalan strategi penerapan industrialisasi dan fokus pada pembiayaan utang yang tidak berkelanjutan. Ini membuat fondasi ekonomi rentan dan gagal menciptakan ketahanan domestik yang kuat. dan meningkatnya ketimpangan sosial

yang dapat ditimbulkan dari Kontraksi ekonomi yang tajam, hilangnya lapangan kerja, dan ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akibat kegagalan fiskal. Hal ini pada akhirnya memicu kerusuhan dan ketidakstabilan politik.

Transisi Ekonomi di Filipina

Transisi ekonomi Filipina terjadi pada tahun 1986 setelah kejatuhan Ferdinand Marcos melalui gerakan People Power Revolution. Krisis ekonomi panjang sejak 1960-an memburuk akibat peningkatan utang luar negeri dan lemahnya tata kelola ekonomi nasional. Pada awal 1970-an, ekonomi sempat tumbuh pesat setelah diberlakukannya darurat militer, dengan pertumbuhan mencapai 8,9% pada 1973 dan 8,8% pada 1976, namun kemajuan ini tidak berkelanjutan karena dikendalikan oleh proyek pembangunan berbiaya pinjaman tinggi (Sicat, 2002). Perekonomian memburuk dan mengalami kontraksi hingga -7% pada 1984-1985, menjadi salah satu krisis paling serius dalam sejarah negara tersebut (Agustina, 2019)

Kebijakan Ekonomi di Negara Filipina

Dalam hal ini tentu dibutuhkan sebuah kebijakan, yang dimana kebijakan ini dapat memberikan solusi serta manfaat kepada masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Setelah transisi pada tahun 1986, Filipina memilih pendekatan yang

mengandalkan keterbukaan pasar dan dukungan eksternal. Kebijakan ini diarahkan untuk pemulihan yang lebih cepat dengan mengandalkan remitansi tenaga kerja sebagai tulang punggung ekonomi. Tujuannya adalah memperbaiki struktur perekonomian yang runtuh dengan privatisasi dan liberalisasi. Untuk memberikan Kontribusi nyata kepada masyarakat, Negara Filipina membutuhkan kebijakan mengenai pertumbuhan ekonomi dimasa jangka panjang. Berikut ini ada beberapa Kebijakan Ekonomi Pasca Transisi di Filipina yang terdiri dari :

1. Privatisasi BUMN dan liberalisasi perdagangan
Kebijakan ini merupakan inti dari liberalisasi ekonomi yang bertujuan membuka pasar, menarik investasi asing, dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi peran negara di sektor bisnis (Setiawan et al., 2025).
2. Penghematan fiskal
melalui deregulasi Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran negara dan memperbaiki kinerja anggaran, seringkali sebagai bagian dari program penyesuaian struktural (Setiawan et al., 2025)
3. Program Structural Adjustment dari IMF dan World Bank sebagai langkah pemulihan (Adiba et al., 2025)
Keterlibatan intens dengan lembaga keuangan internasional menjadi penentu pemulihan, yang mencakup persyaratan seperti

privatisasi dan liberalisasi, namun juga membuat ekonomi rentan terhadap kondisi global (Simanungkalit et al., 2025)

Analisis Perbandingan Transisi Ekonomi Indonesia dan Filipina

Analisis perbandingan terhadap transisi ekonomi Indonesia dan Filipina menunjukkan bahwa kedua negara menghadapi krisis besar yang menjadi titik balik perubahan kebijakan ekonomi dan arah pembangunan nasional. Meskipun sama-sama berangkat dari kondisi krisis, strategi pemulihan dan reformasi ekonomi yang diterapkan menghasilkan hasil yang berbeda. Perbedaan mendasar dapat dilihat dari waktu transisi, respon kebijakan, dan struktur perekonomian yang menjadi fokus (Indonesia & Darmastuti, 2021)

Filipina memasuki masa transisi pada tahun 1986 setelah krisis ekonomi berkepanjangan dan meningkatnya beban utang luar negeri yang mendorong kejatuhan rezim Marcos. Krisis tersebut ditandai dengan kontraksi ekonomi -7% pada tahun 1984-1985 dan lonjakan utang luar negeri dari 13 miliar USD pada 1979 menjadi 29 miliar USD pada 1989, yang menunjukkan lemahnya fondasi ekonomi dan kegagalan strategi pertumbuhan berbasis pembiayaan utang (Solon & Floro, 1993). Selain itu, kebijakan pembangunan berbasis pinjaman yang tidak berkelanjutan dan kegagalan penerapan industrialisasi menyebabkan instabilitas

ekonomi dan sosial (Sicat, 2002). Oleh karena itu, respons kebijakan ekonomi Filipina setelah transisi fokus pada privatisasi, liberalisasi, dan dukungan IMF melalui program Structural Adjustment untuk memperbaiki kembali struktur perekonomian nasional (Abocejo, n.d.)

Sebaliknya, Indonesia memasuki transisi pada tahun 1998 setelah krisis moneter Asia menghancurkan stabilitas makroekonomi, menyebabkan runtuhnya sistem perbankan, penurunan tajam nilai rupiah, dan pertumbuhan ekonomi menjadi -13%. Berbeda dengan Filipina yang lebih mengandalkan dukungan eksternal, Indonesia memilih strategi pemulihan berbasis reformasi internal melalui restrukturisasi perbankan, desentralisasi fiskal, dan penguatan UMKM sebagai basis ekonomi domestik. Pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada modal luar negeri dan memperkuat daya tahan ekonomi internal (Siagian, 2004).

Dari perspektif struktur ekonomi, Filipina bergerak menuju ekonomi

berbasis sektor jasa dan remitansi tenaga kerja luar negeri, yang menyumbang sekitar 11% PDB dan berfungsi sebagai penyelamat perekonomian nasional pasca transisi (Siagian, 2004). Sementara Indonesia memperkuat struktur ekonomi melalui sektor manufaktur dan UMKM yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan penopang pertumbuhan domestik pasca reformasi 2023, 2021 (Ariani et al., 2024).

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa Filipina mengalami pemulihan ekonomi yang lebih cepat setelah transisi akibat dukungan internasional, namun dengan risiko kerentanan struktural terhadap fluktuasi global. Sebaliknya, pemulihan Indonesia berlangsung lebih lambat, tetapi menghasilkan fondasi ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang. Hal ini membuktikan bahwa ketahanan ekonomi yang kokoh membutuhkan reformasi struktur ekonomi dan institusi, bukan hanya percepatan pertumbuhan jangka pendek (Santoso & Samputra, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Transisi Ekonomi Indonesia dan Filipina

ASPEK	INDONESIA	FILIPINA
Waktu transisi	1998 (pasca krisis moneter Asia)	1998 (pasca krisis moneter Asia)
Penyebab	Kolapsnya sistem	Krisis utang &

utama	perbankan & mata uang	instabilitas politik
Pola pertumbuhan sebelum transisi	Pola pertumbuhan sebelum transisi	Fluktuasi tajam dan stagnasi
Motor ekonomi pemulihan	Industri, UMKM, dan reformasi perbankan	Industri, UMKM, dan reformasi perbankan
Ketergantungan ekonomi	Fokus pada pasar domestik	Tinggi pada pinjaman luar negeri & remitansi
Kebijakan utama	Restrukturisasi keuangan, desentralisasi fiskal	Privatisasi & SAP IMF
Hasil pemulihan	Stabil bertahap, lebih tahan krisis	Pemulihan cepat namun rapuh

PENUTUP

Bagian Kajian mengenai transisi ekonomi Indonesia dan Filipina menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, struktur perekonomian, serta kemampuan negara mengatasi tekanan krisis. Walaupun kedua negara sama-sama mengalami krisis besar yang menjadi pemicu perubahan rezim pemerintahan, pendekatan yang dipilih untuk memulihkan ekonomi berbeda dan menghasilkan arah pembangunan yang tidak sama (Anggraini, 2024).

Filipina memulai transisi lebih awal, yaitu pada tahun 1986, setelah tumbangannya pemerintahan Ferdinand Marcos akibat memburuknya kondisi ekonomi dan meningkatnya beban

utang luar negeri. Pemerintah pasca-transisi memilih menerapkan kebijakan ekonomi terbuka melalui privatisasi, deregulasi, dan kerja sama intens dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF. Transformasi ini mendorong perubahan struktur ekonomi dari berbasis pertanian menuju sektor jasa dan penguatan remitansi pekerja migran. Remitansi kemudian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ketergantungan yang tinggi pada pembiayaan eksternal dan pasar tenaga kerja luar negeri membuat perekonomian Filipina rentan terhadap perubahan kondisi global dan kurang didukung oleh struktur produksi domestik yang kuat.

Sementara itu, Indonesia memasuki masa transisi pada tahun 1998 setelah krisis moneter Asia menimbulkan keruntuhan sektor keuangan, kejatuhan nilai rupiah, dan ketidakstabilan politik yang mengakhiri rezim Orde Baru. Pemerintahan baru menempuh strategi pemulihan yang berbeda dari Filipina, yaitu dengan melakukan reformasi struktural dan memperbaiki tata kelola ekonomi melalui restrukturisasi sistem perbankan, desentralisasi fiskal, peningkatan transparansi ekonomi, serta penguatan sektor industri dan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi. Pendekatan ini menempatkan pembangunan domestik sebagai dasar utama pertumbuhan, sehingga menghasilkan pemulihan yang berlangsung lebih perlahan tetapi lebih stabil dalam jangka panjang. Perbandingan kedua pengalaman tersebut menegaskan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari percepatan pemulihan ekonomi, namun ditentukan oleh kekuatan fondasi ekonomi yang dibangun setelahnya. Filipina sukses meningkatkan stabilitas jangka pendek melalui pembukaan pasar, namun tetap menghadapi kerentanan struktural. Sebaliknya, Indonesia berupaya membangun ketahanan ekonomi yang lebih dalam melalui transformasi kelembagaan dan pengembangan sektor produktif dalam negeri (Azizah & Yasin, 2024).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa arah kebijakan transisi ekonomi dan pendekatan penguatan struktur produksi memainkan peran penting dalam menentukan daya tahan sebuah negara menghadapi perubahan global. Pengalaman kedua negara menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan fondasi domestik yang kuat, kapasitas kelembagaan yang efektif, dan strategi jangka panjang yang tidak bertumpu pada ketergantungan eksternal (Nanga & Widjaja, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Abocejo, F. T. (n.d.). *The Impact of International Monetary Fund (IMF) Structural Adjustment Policies (SAP) on the Philippines*. 19-24.
- Adiba, A. F., Sari, P. K., & Urifah, I. (2025). *Lesson from History : Navigating Turbulent Waters – The IMF ' s Role in Global Economic Stabilization*. 6(1), 13-22.
- Aditya, A., Ferarry, I., Fajri, I., & Mustika, D. A. (2023). *TRANSFORMASI REGULASI : STRATEGI HUKUM DALAM MENANGANI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA E-COMMERCE*. 10(1), 344-352.
- Agustina, N. laras. (2019). No Title.

- ペインクリニック学会治療指針 2, 1-9.
- Ahmed, I., & Ahsan, M. (2024). *The nexus between foreign direct investment and exports led- economic growth: Latest evidence from Pakistan using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach.* 27(2), 25-50.
- Anggraini, S. (2024). *POLITIK EKONOMI REMITANSI DI FILIPINA (2015-2024): ANALISIS PERAN PEKERJA MIGRAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN DIPLOMASI TENAGA KERJA* Caitlyn.
- Aprillia, A., Syahfia, N., Putri, W. F., & Nasution, D. P. (2024). *Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Makroprudensial di 5 Negara ASEAN.* 5(1), 264-279.
- Ariani, A. D., Zouly, D., Cahyono, I., & Azizah, R. N. (2024). *Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Pemerintah untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020 - 2023.* 3(2), 91-103.
- Ariffianti, A., & Maryam, A. M. (2025). *Analisis Faktor-Faktor Kerentanan Dan Strategi Ketahanan Ekonomi Indonesia Menghadapi Krisis Global.* 2(4), 45-49.
- Azizah, A. W., & Yasin, M. (2024). *Konsep Transformasi Struktural Pada Sektor Industri.* 3, 194-200.
- Caesar, M. R., Sonia, G., & Anggeriani, T. (2025). *PERANAN INVESTASI SWASTA DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2020-2024 THE ROLE OF PRIVATE INVESTMENT IN DRIVING INDONESIA ' S ECONOMIC GROWTH IN 2020-2024.* November, 9685-9691.
- Chalandra, C. N., Hidayah, N., & Aulia, A. K. (2025). *Historia pedagogia.* 14.
- Ginting, K. R., Benuvin, D., & Ginting, P. (2021). *KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA MENUJU.* 3(2), 95-100.
- Hartati, Y. S. R. I. (2021). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura.* 12, 79-92.
- Indonesia, S. K., & Darmastuti, S. (2021). *COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi : 4(1), 70-86.*
- khoirul fahmi rizqi, saiful anwar nuris, ainun hayat. (2024). *PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL.*
- Kusumawati, D. A., Saizikri, A., Syaputra, D., Malik, A., Syariah, P. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). *UTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA.* 6689-6696.
- Nanga, M., & Widjaja, W. (2024). *Structural Transformation in the Indonesian Economy: Why does ' Financial Development '*

- Matter ? 19(2), 213–222.
- rachmat hidayatullah. (2022). EPIFANIO DE LOS SANTOS AVENUE (EDSA) REVOLUTION: PERUBAHAN SOSIAL POLITIK DI FILIPINA TAHUN 1983-1992.
- Santoso, F. Y. E., & Samputra, P. L. (2024). *Comparative analysis of Indonesia ' s economic resilience in the Asia-Pacific context*. 1(2), 131–157.
- Saputro, G. E. (2025). *Strategies for Strengthening the Economic Resilience of Small Industries*. 4(1), 285–297.
- Setiawan, M. R., Pangaribawan, R. D., & Fadiansyah, B. A. (2025). *Dampak Privatisasi BUMN terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia*. 4(6), 9635–9641.
- Siagian, V. (2004). Analisa Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Filipina Periode 1994-2003. *Jurnal Perdagangan*, 1–13. [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(13\)soca-victor-sumber-sumberpertmbhn\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(13)soca-victor-sumber-sumberpertmbhn(1).pdf)
- Sicat, G. P. (2002). *Political Economy of Philippine Economic Reforms*.
- Simanungkalit, J., Panjaitan, D., Simanjuntak, F., & Sitinjak, P. (2025). *Analisis Peran dan Dampak Lembaga Keuangan Internasional terhadap Kemandirian Ekonomi Negara Berkembang*. 10(September), 250–259.
- Siswantoro. (2024). *Financial system stability in Indonesia and its relationship with economic growth before and during the Covid-19 pandemic* Siswantoro.
- Solon, O., & Floro, M. S. (1993). The Philippines in the 1980s: A review of national and urban level economic reforms. *Urban Development Division Transportation, Water, and Urban Development Department Environmentally Sustainable Development, the World Bank, February*, 1–76.
- Susanto, D. (2025). *Perkembangan Sistem Ekonomi di Indonesia*. 11(1), 72–79.